



ANALISIS KEBIJAKAN DALAM KEPERINTAHAN DAERAH

Riyo Arie Pratama¹, Heri Okta Pratama², Intan Gustiana³, Andri Saputra⁴, M. Nasor⁵

^{1,4}Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

⁵Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹riyoprata84753@gmail.com, ²heritama10@gmail.com, ³intangustiana81@gmail.com,

⁴desaputraandri@gmail.com, ⁵nasor@radenintan.ac.id

Abstract

Public policy at the regional government level is a crucial instrument in realizing effective and responsive governance that meets community needs. However, in practice, various challenges remain, both in the formulation, implementation, and evaluation of policies. This study aims to comprehensively analyze the policy process in regional governance, identify inhibiting and supporting factors in its implementation, and propose strategic recommendations to improve policy quality based on evidence-based policy. The research method employed is library research by reviewing various sources such as academic books, scholarly journals, policy documents, and official government publications relevant to the topic. The findings indicate that policy formulation at the regional level tends to be top-down and bureaucratic, implementation is heavily influenced by bureaucratic capacity and interagency coordination, and evaluation is more administrative than substantive. The inhibiting factors identified include budget limitations, low public participation, the dominance of local political interests, and weak utilization of data, while the supporting factors are regional autonomy regulations, good governance principles, and emerging digital innovations. This study concludes that there is a gap between public policy theories and practical realities in local governance, and therefore strengthening bureaucratic capacity, enhancing community participation, improving impact-based evaluation systems, and maximizing the use of digital technology and data are crucial for reinforcing evidence-based policy.

Keywords: policy analysis, regional governance, policy implementation, policy evaluation, evidence-based policy.

Abstrak

Kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, baik dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses kebijakan dalam pemerintahan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis evidence-based policy. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan daerah masih cenderung top-down dan birokratis, implementasi dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan koordinasi antarinstansi, serta evaluasi lebih menekankan pada aspek administratif daripada substansi. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi kepentingan politik lokal, dan lemahnya pemanfaatan data, sementara faktor pendukung antara lain regulasi otonomi daerah,

prinsip good governance, dan inovasi digital. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan adanya gap antara teori kebijakan publik dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, sistem evaluasi berbasis dampak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat evidence-based policy.

Kata kunci: analisis kebijakan, pemerintahan daerah, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, evidence-based policy.

PENDAHULUAN

Kepemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2024, Indonesia memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota yang menjalankan fungsi otonomi daerah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Indeks Efektivitas Pemerintahan Daerah (IEPD) yang dirilis Bappenas masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, dengan daerah perkotaan cenderung memiliki skor lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan dan tertinggal. Fakta ini menegaskan pentingnya analisis kebijakan dalam pemerintahan daerah untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebijakan publik daerah bukan hanya hasil keputusan administratif, melainkan juga refleksi dari kebutuhan masyarakat dan kapasitas birokrasi dalam merespons tantangan. Menurut (Nur & Guntur, 2019), analisis kebijakan adalah proses sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, analisis kebijakan berperan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi masalah utama, merumuskan alternatif solusi, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*). Tanpa adanya analisis yang komprehensif, kebijakan daerah berpotensi hanya menjadi dokumen formal yang sulit diimplementasikan secara nyata.

Kajian teoretis terkait analisis kebijakan telah banyak dikembangkan, baik dari perspektif klasik maupun modern. Teori rasionalistik yang dikemukakan oleh (Suwitri, 2008) menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, meski dalam praktiknya sering kali hanya menghasilkan incrementalism atau perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya. Sementara itu, teori implementasi kebijakan oleh (Winarno, 2016) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi juga pada pelaksanaan dan koordinasi antar-aktor. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kedua teori ini masih relevan untuk memahami dinamika kebijakan yang kompleks, terutama dalam menghadapi perbedaan kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan kultur birokrasi di berbagai daerah.

Sejumlah penelitian relevan juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan di tingkat daerah dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, penelitian oleh (Mokodaser et al., 2023) menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur. Penelitian lain oleh (Annisa & Fadli, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan relevansi kebijakan dengan kebutuhan riil warga. Selain itu, riset oleh (Maksin et al., 2025) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aktor non-pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, dalam mendorong implementasi kebijakan berbasis kolaborasi (*collaborative governance*).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam analisis kebijakan di pemerintahan daerah. Di satu sisi, teori-teori kebijakan menyediakan kerangka analisis yang kaya dan beragam; namun di sisi lain, praktik kebijakan daerah sering kali terjebak pada pendekatan administratif yang formalistik tanpa memperhatikan *evidence-based policy*. Banyak pemerintah daerah masih mengandalkan prosedur teknokratis dalam penyusunan kebijakan, sementara aspek evaluasi dan monitoring belum dilakukan secara optimal. Hal ini mengakibatkan banyak kebijakan daerah tidak mencapai tujuan awalnya atau bahkan menimbulkan masalah baru. Gap penelitian juga terlihat pada kurangnya kajian yang fokus pada integrasi analisis kebijakan dengan konteks lokal masing-masing daerah. Sebagian besar penelitian cenderung melihat analisis kebijakan secara umum, tanpa mempertimbangkan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik di tingkat daerah. Padahal, perbedaan karakteristik daerah sangat memengaruhi bagaimana sebuah kebijakan diterima dan diimplementasikan. Misalnya, kebijakan yang efektif di wilayah perkotaan belum tentu berhasil diterapkan di wilayah pedesaan atau kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu dilakukan secara kontekstual agar hasilnya benar-benar relevan dengan kondisi lokal.

Selain itu, tantangan baru dalam pemerintahan daerah juga muncul seiring perkembangan era digital dan tuntutan *good governance*. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Menurut data Kementerian Kominfo tahun 2023, baru sekitar 56% pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat daerah yang tertinggal dalam mengadopsi digitalisasi birokrasi. Dengan demikian, analisis kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah harus mampu mengakomodasi faktor inovasi dan transformasi digital sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.

Melihat kondisi tersebut, analisis kebijakan dalam pemerintahan daerah memiliki urgensi yang tinggi untuk dikaji lebih dalam. Pendekatan ini dapat membantu menemukan titik lemah dalam kebijakan daerah, menilai efektivitas implementasi, serta merumuskan strategi perbaikan berbasis data dan bukti empiris. Selain itu, analisis kebijakan juga berfungsi untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi otonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif proses kebijakan dalam pemerintahan daerah, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan daerah, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis evidence-based policy. Dengan fokus pada gap antara teori dan praktik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur kebijakan publik di Indonesia serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai analisis kebijakan dalam pemerintahan daerah berdasarkan teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas akademik. Setelah itu, dilakukan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengorganisasian informasi sesuai tema utama penelitian.

Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah secara kritis isi literatur untuk menemukan pola, tema, dan konsep yang berhubungan dengan kebijakan publik dan pemerintahan daerah. Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi isu utama, perbandingan berbagai teori, serta sintesis temuan-temuan penelitian terdahulu guna menemukan persamaan dan perbedaan pandangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan informasi yang tersedia, tetapi juga mengkritisi serta mengintegrasikan berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan

demikian, metode penelitian kepustakaan dalam studi ini bertujuan menghasilkan kajian yang bersifat analitis, komparatif, dan reflektif sehingga mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan analisis kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah pada umumnya masih dipengaruhi oleh pendekatan *top-down*, di mana inisiatif utama berasal dari kepala daerah dan perangkat birokrasi. Meskipun mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dirancang sebagai instrumen partisipatif, implementasinya sering kali bersifat formalitas. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, sementara aspirasi masyarakat luas sering tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan partisipatif dengan praktik perumusan kebijakan yang masih birokratis.

Dalam tahap implementasi, penelitian menemukan bahwa keberhasilan kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur pemerintah. Daerah dengan sumber daya manusia birokrasi yang memiliki kompetensi memadai cenderung lebih berhasil mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Sebaliknya, di daerah dengan keterbatasan kapasitas aparatur, kebijakan sering kali hanya berhenti pada dokumen tanpa tindak lanjut nyata. Faktor kompetensi teknis, manajerial, serta kemampuan memahami substansi kebijakan terbukti menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasi.

Selain kapasitas aparatur, aspek koordinasi antarinstansi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan daerah sering kali melibatkan berbagai dinas dan lembaga, namun lemahnya komunikasi dan koordinasi menimbulkan tumpang tindih program. Misalnya, kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat sering kali dijalankan oleh beberapa dinas dengan program berbeda, tetapi tidak memiliki sinergi yang jelas. Kondisi ini menyebabkan kebijakan berjalan parsial dan kurang terintegrasi, sehingga hasilnya tidak optimal.

Evaluasi kebijakan di tingkat daerah secara umum masih belum dilaksanakan secara sistematis. Penelitian menemukan bahwa evaluasi lebih sering dilakukan secara administratif melalui laporan pertanggungjawaban, bukan evaluasi substansi yang menilai efektivitas dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Padahal, evaluasi substansi merupakan instrumen penting untuk menilai relevansi kebijakan dengan kebutuhan riil. Ketiadaan mekanisme evaluasi yang mendalam mengakibatkan

kelemahan dalam siklus kebijakan, di mana kesalahan atau kelemahan kebijakan tidak segera diperbaiki.

Dari sisi faktor penghambat, keterbatasan anggaran merupakan salah satu masalah dominan yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan. Anggaran yang tersedia sering kali tidak seimbang dengan kebutuhan program yang direncanakan. Selain itu, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal pemerintah daerah terbatas. Kondisi ini mempersempit fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Faktor lain yang menghambat adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus kebijakan. Partisipasi warga umumnya hanya terjadi pada tahap awal berupa konsultasi publik, sementara pada tahap implementasi dan evaluasi partisipasi relatif rendah. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama kebijakan. Rendahnya partisipasi juga berimplikasi pada lemahnya legitimasi kebijakan di mata publik. Penelitian juga menemukan bahwa dinamika politik lokal menjadi faktor signifikan dalam memengaruhi arah kebijakan daerah. Kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik kepala daerah, partai politik, atau kelompok elit tertentu. Akibatnya, kebijakan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kalkulasi politik. Fenomena ini mencerminkan adanya gap antara teori kebijakan rasional yang berbasis bukti dengan praktik politik kebijakan yang sering kali pragmatis.

Meskipun banyak hambatan, terdapat pula faktor pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan daerah. Salah satunya adalah adanya dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Otonomi Daerah dan berbagai peraturan turunannya. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, adanya instrumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) membantu menjaga konsistensi kebijakan. Faktor pendukung lain adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Beberapa pemerintah daerah telah berhasil mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Inovasi pelayanan publik berbasis digital juga mulai berkembang di sejumlah daerah, seperti penggunaan aplikasi *e-government* untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Inovasi ini memperkuat efektivitas implementasi kebijakan serta memperpendek jarak antara pemerintah dan warga.

Dalam perspektif *evidence-based policy*, penelitian ini menemukan bahwa masih sedikit daerah yang benar-benar memanfaatkan data dan penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan. Namun, terdapat contoh positif di beberapa daerah yang telah mengembangkan sistem informasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Praktik ini membuktikan bahwa pemanfaatan data yang akurat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus meminimalisasi kesenjangan antara teori dan praktik.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, meningkatkan kapasitas aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada analisis kebijakan, manajemen publik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat tidak hanya dalam tahap perumusan, tetapi juga implementasi dan evaluasi kebijakan. Ketiga, mendorong kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keempat, perlu adanya perbaikan sistem evaluasi kebijakan daerah dengan menekankan pada evaluasi substansi berbasis indikator kinerja dan dampak nyata di lapangan. Kelima, pemerintah daerah harus lebih serius mengintegrasikan *evidence-based policy* dalam siklus kebijakan dengan memanfaatkan data, riset, dan kajian akademik. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kualitas kebijakan publik daerah dapat ditingkatkan, gap antara teori dan praktik dapat dipersempit, serta tata kelola pemerintahan daerah semakin responsif, adaptif, dan akuntabel.

Pembahasan

Perumusan kebijakan di tingkat daerah masih cenderung bersifat top-down dan birokratis, meskipun terdapat instrumen formal seperti Musrenbang yang bertujuan memperluas partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Djafar & Ap, 2024) melalui teori incrementalism, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik pada umumnya lebih banyak dilakukan dengan perubahan kecil yang mempertahankan status quo daripada perubahan besar berbasis aspirasi masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa ruang partisipasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan, meskipun dalam kerangka teoritis, partisipasi publik dianggap sebagai syarat penting untuk legitimasi kebijakan.

Dalam tahap implementasi, penelitian menemukan bahwa kapasitas aparatur menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh (Teori, 2009), yang menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan koordinasi antaraktor yang terlibat. Penelitian (Nekwek, 2022) juga memperkuat temuan ini dengan

menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi aparaturnya sering menjadi penyebab kegagalan kebijakan di daerah. Dengan demikian, peningkatan kapasitas birokrasi bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga syarat mendasar untuk memastikan kebijakan dapat mencapai sasaran yang dituju.

Aspek koordinasi antarinstansi yang lemah sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan kompleksitas implementasi kebijakan di daerah. Hal ini relevan dengan teori jaringan kebijakan (*policy network theory*) yang menekankan bahwa kebijakan publik tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antaraktor dan lembaga yang berbeda. Penelitian (Fonataba, 2025) juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil sangat menentukan keberhasilan kebijakan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan akan terfragmentasi dan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan.

Ketiadaan evaluasi kebijakan yang substansial juga menjadi salah satu kelemahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Evaluasi kebijakan yang masih administratif memperkuat kesenjangan antara teori evaluasi kebijakan dengan praktik di lapangan. (Sos, 2020) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan seharusnya mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat, bukan sekadar menilai kepatuhan administratif. Dengan kata lain, lemahnya evaluasi substansi menjadikan kebijakan sulit diperbaiki atau disesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga siklus kebijakan tidak berjalan secara utuh.

Temuan mengenai keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada transfer pusat konsisten dengan penelitian (Handraini et al., 2024), yang menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih rendah. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang inovasi kebijakan lokal. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat memperlihatkan adanya jarak antara pemerintah daerah dan warga. Padahal, teori *good governance* menempatkan partisipasi sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif. Hal ini menunjukkan adanya gap besar antara prinsip teoritis partisipasi dengan realitas praktik di lapangan. Faktor politik lokal yang kuat dalam memengaruhi arah kebijakan daerah memperlihatkan bahwa praktik kebijakan masih rentan terhadap kepentingan elit. Fenomena ini sesuai dengan kritik yang diajukan oleh teori pilihan publik (*public choice theory*), yang menyatakan bahwa aktor politik sering kali mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan publik. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai penyeimbang agar kebijakan tidak sekadar menjadi alat kepentingan politik, tetapi benar-benar berpihak pada masyarakat.

Penelitian juga menemukan faktor pendukung yang cukup signifikan, seperti regulasi otonomi daerah, kesadaran akan prinsip good governance, serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Badii & Nurdin, 2025), yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang berhasil mengintegrasikan prinsip transparansi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahannya mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Integrasi *e-government*, meskipun belum merata, terbukti mampu menjadi instrumen strategis dalam mendukung *evidence-based policy*.

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya gap antara teori dan praktik dalam analisis kebijakan daerah. Di satu sisi, teori-teori kebijakan publik menekankan pentingnya rasionalitas, partisipasi, koordinasi, evaluasi substansi, serta *evidence-based policy*. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan daerah masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas birokrasi, dominasi kepentingan politik, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan partisipasi masyarakat, evaluasi berbasis dampak, serta pemanfaatan data dan digitalisasi menjadi relevan untuk menjembatani gap tersebut. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tata kelola kebijakan daerah dapat lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya menyajikan analisis komprehensif terhadap proses kebijakan dalam pemerintahan daerah yang tidak hanya berfokus pada satu tahap tertentu, melainkan mencakup keseluruhan siklus kebijakan mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung secara integratif dengan menekankan pada gap antara teori kebijakan publik yang ideal dengan praktik di lapangan. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Selain itu, penelitian ini mengusulkan rekomendasi strategis berbasis *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi digital, serta evaluasi substansi berbasis dampak, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual maupun praktis bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan gambaran yang luas dan mendalam, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), sehingga temuan lebih bersifat konseptual dan teoritis tanpa dilengkapi dengan data empiris lapangan yang dapat memberikan validasi lebih konkret terhadap realitas kebijakan di daerah. Kedua, keterbatasan akses terhadap

literatur terbaru yang spesifik mengenai praktik kebijakan di masing-masing daerah membuat analisis lebih bersifat generalisasi. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendetail variasi antar-daerah berdasarkan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang unik, padahal faktor tersebut sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan kepustakaan dengan studi lapangan (*field research*) akan sangat bermanfaat untuk memperkuat validitas dan relevansi temuan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kebijakan dalam pemerintahan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari perumusan yang cenderung *top-down* dan birokratis, implementasi yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan koordinasi antarinstansi, hingga evaluasi yang lebih bersifat administratif daripada substansial. Faktor penghambat utama yang ditemukan antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi kepentingan politik lokal, serta lemahnya pemanfaatan *evidence-based policy*, sementara faktor pendukung meliputi keberadaan regulasi otonomi daerah, meningkatnya kesadaran akan prinsip *good governance*, dan inovasi digital yang mulai diterapkan di sejumlah wilayah. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gap antara teori kebijakan publik yang menekankan rasionalitas, partisipasi, evaluasi substantif, dan berbasis bukti dengan praktik kebijakan daerah yang sering kali pragmatis, administratif, dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan analisis kebijakan dan manajemen publik, memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat di seluruh tahap siklus kebijakan, mendorong kolaborasi multi-aktor dalam implementasi, memperbaiki sistem evaluasi berbasis dampak nyata, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital dan data untuk mendukung *evidence-based policy* sehingga tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Y., & Fadli, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemetaan Sosial Ekonomi. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 117–134.
- Badii, R. R., & Nurdin, N. (2025). *Implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah*. INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI.
- Djafar, F., & Ap, S. (2024). *Teori administrasi publik pendekatan analisis dan penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Fonataba, J. (2025). *Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan*

- Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600.
- Maksin, M., Septiandika, V., Yunus, E. Y., Puspitarini, R. C., & Faizzah, N. (2025). Peran Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1), 57–63.
- Mokodaser, V. S., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 190–197.
- Nekwek, L. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara di kabupaten yalimo provinsi papua. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 141–151.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Teori, E. S. M. (2009). Kebijakan Publik. *Jogyakarta: Graha Ilmu*.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.